

Terapkan Accrual Basic, Dua Tahun Raih WTP

SEMARANG—Pemkot Semarang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) tahun 2013. Capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah ini mengulang prestasi tahun 2012 lalu.

Dua tahun berturut-turut meraih opini WTP tak lepas dari penerapan sistem keuangan Accrual Basic. Kota ATLAS merupakan satu-satunya kota/kabupaten yang pertama kali mengimplementasi sistem keuangan *accrual basic* di Indonesia sejak tahun 2002. Dalam sistem *accrual* mencatat transaksi pada saat hak pendapatan atau hak belanja terjadi kendati kas belum menerima atau mengeluarkan uang.

Dengan sistem ini akan memberikan transparansi kepada publik dan pemangku

kepentingan pemerintah. Karena hak dan kewajiban dicatat transparan serta sesuai aliran hak dan kewajiban yang ada.

“Kita sudah berada pada jalur yang benar sebagaimana diamanatkan dalam UU No 17/2003 tentang keuangan negara dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual,” kata Sekretaris Daerah Kota Semarang Adi Trihananto, yang menerima penghargaan ini Jumat (12/9) di Jakarta dari Menteri Keuangan, kemarin.

Kota/kabupaten lain masih menggunakan *Cash Toward Accrual*. Sebagai satu-satunya kota pengimplementasi *accrual basic*, makabanyak kabupaten/kota yang datang menimba ilmu dan pengetahuan penerapan sistem *accrual basis* ke Pemkot Semarang. Sistem ini juga yang diterapkan dinegara-negara maju seperti Inggris, AS, Selandia Baru, dan Australia.

Menurut Adi, Pemkot Semarang akan terus melakukan penyempurnaan baik dari peraturan, prosedur, sistem, tata kelola dan tentunya sumber daya manusia. “Saya berharap dengan diterimanya penghargaan Menkeu ini menjadi pendorong semangat SKPD dalam mengelola keuangan pemerintah,” katanya.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa terhadap LKDP Kota Semarang tahun 2013 yang meliputi beberapa aspek. Seperti neraca per 31 Desember 2012 dan 2013, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2013.

Hasil dari pemeriksaan dinyatakan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena

itu, dinyatakan memperoleh opini WTP atas LHP laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Anggota DPRD Kota Semarang Ari Purbono mengapresiasi prestasi yang telah diraih tersebut. Tapi meminta Pemkot Semarang harus memerhatikan dan bisa melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh dewan. Seperti rekomendasi untuk meningkatkan kinerja terkait upaya meningkatkan pendapatan retribusi parkir yang sejak tahun 2007 tak pernah mencapai target. “Historis rekomendasi akan bisa menjadi perhatian BPK sehingga bisa saja nanti Pemkot Semarang tidak lagi mendapatkan opini WTP. Karena rekomendasi meningkatkan kinerja (parkir) tersebut belum juga mampu diwujudkan pemkot,” katanya. (sgt)